



Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2024

Andika Doni Setiawan

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

korespondensi, andikadoni1309@gmail.com

Submit: 1 Agustus 2025, Diterima: 25 September 2025, Terbit: 30 September 2025

Abstrak

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *stunting*. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang meliputi variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, serta faktor ekonomi, sosial, dan politik.

Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya konvergensi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Faktor pendukung utama meliputi tingginya komitmen pemerintah daerah, adanya layanan posyandu, serta dukungan anggaran melalui APBD. Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tantangan dalam alokasi anggaran yang belum terfokus sepenuhnya pada penanganan *stunting*.

Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan edukasi masyarakat. Sebagai sarana, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran posyandu, meningkatkan koordinasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan data, serta menggandeng sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Kata kunci: *Stunting*, implementasi kebijakan, faktor pendukung, faktor penghambat.

Abstract

Study purpose. This study aims to analyse the implementation of *stunting* prevention policies in Bandung Regency. This policy is regulated through Regent Regulation No. 74 of 2019 concerning the Acceleration of *Stunting* Prevention and Control. The theory used is Van Meter and Van Horn's policy implementation

theory, which includes variables such as policy standards and objectives, resources, inter-organisational communication, characteristics of implementing organisations, and economic, social, and political factors.

Materials and methods. *This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document studies.*

Results. *The results showed that Bandung Regency had made various cross-sectoral convergence efforts to reduce the prevalence of stunting. The main supporting factors included the high commitment of the local government, the availability of integrated health service posts (posyandu), and budget support through the regional budget (APBD). However, the study also identified a number of inhibiting factors, such as limited human resources and capacity, low public awareness, weak cross-sectoral coordination, and challenges in budget allocation that is not yet fully focused on tackling stunting.*

Conclusion. *The conclusion of this study is that the implementation of the Stunting Management Policy in Bandung Regency in 2024 has been quite successful, but improvements are still needed in terms of cross-sectoral synergy, increasing human resource capacity, and strengthening public education. As a means to this end, the local government needs to optimise the role of integrated health service posts (posyandu), improve cross-sector coordination, utilise technology for data monitoring, and engage the private sector and the community to support efforts to accelerate stunting reduction.*

Keywords: *Stunting, policy implementation, supporting factors, hindering factors.*

DOI: <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i3.1480>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Kesehatan masyarakat merupakan faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian serius di Indonesia adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif dan produktivitas individu di masa depan. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar dalam penanganan stunting. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, angka prevalensi stunting masih tinggi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pola asuh, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, serta kurangnya edukasi mengenai gizi menjadi penyebab utama masalah ini. Prevalensi stunting di Indonesia masih di atas batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Di Kabupaten Bandung, meskipun telah terjadi penurunan angka stunting, namun tantangan dalam implementasi kebijakan masih banyak dijumpai. Salah satu kendala utama adalah koordinasi antar sektor serta kurangnya efektivitas intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam menangani stunting di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerapkan berbagai kebijakan berbasis nasional, termasuk Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Program ini mencakup intervensi gizi spesifik yang berfokus pada ibu hamil dan anak usia dini serta intervensi gizi sensitif yang melibatkan sektor non-kesehatan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan delapan aksi konvergensi penanganan stunting, seperti analisis situasi, rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, dan publikasi data

stunting. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bandung antara lain komitmen pemerintah daerah, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta dukungan dari organisasi masyarakat dan dunia usaha. Namun, beberapa faktor penghambat masih menjadi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi, serta rendahnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan edukasi gizi dan pola asuh juga menjadi kendala utama dalam upaya penanggulangan stunting.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami penyebab dan dampak stunting, serta efektivitas intervensi yang telah diterapkan. WHO (2014) menyatakan bahwa stunting merupakan hambatan utama dalam perkembangan manusia secara global, dengan dampak jangka panjang berupa menurunnya kapasitas belajar, produktivitas kerja, serta meningkatnya risiko penyakit tidak menular di masa dewasa. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018. Namun, angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2024 yang menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14%. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa akses terhadap layanan dasar yang memadai sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Hanya sekitar 28,7% balita yang memiliki akses simultan terhadap layanan dasar seperti akta kelahiran, air bersih, sanitasi, dan ASI eksklusif. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bertujuan meneliti implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bandung.

Bahan dan Metode

Sampel

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan utama terdiri dari:

1. Pejabat di Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
2. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam program stunting
3. Orang tua dan keluarga yang terdampak stunting

Organisasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis data non-numerik. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam mengkaji implementasi kebijakan dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan stunting dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Variabel utama yang dianalisis meliputi: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya. Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Observasi:** Mengamati pelaksanaan kebijakan di lapangan.
2. **Wawancara:** Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci.
3. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data dari laporan resmi, regulasi, dan foto terkait implementasi kebijakan.

Teknik analisis data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan:

1. **Reduksi Data:** Menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh.
2. **Penyajian Data:** Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, Adapun hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan penanganan Stunting di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi Stunting melalui pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu agar dapat dievaluasi. Kabupaten Bandung telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan lintas sektor serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program intervensi sensitif dan spesifik.

Namun, dalam implementasinya, beberapa target layanan masih belum tercapai secara optimal, antara lain:

- a. Cakupan konseling gizi ibu hamil: Target 90%, capaian 45,3%
- b. Rumah tangga dengan akses air minum layak: Target 90%, capaian 0,3%
- c. Anak yang mengikuti PAUD: Target 90%, capaian 31,2%
- d. Desa yang menerapkan KRPL: Target 100%, capaian 33,9%

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini meliputi:

- a. Dana yang dialokasikan lebih banyak untuk sektor kesehatan, sementara sektor lain seperti pendidikan dan sosial belum optimal dalam mendukung upaya penurunan Stunting.
- b. Sebagian besar perangkat daerah masih menganggap Stunting sebagai masalah kesehatan semata, sehingga pendekatan lintas sektor belum berjalan maksimal.
- c. koordinasi implementasi masih kurang optimal, terutama di tingkat desa.

Meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta perubahan pola pikir dalam memahami bahwa penanganan Stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga sektor lainnya.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pemenuhan berbagai sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, fasilitas, serta sistem informasi dan teknologi.

Alokasi dana digunakan untuk mendukung intervensi seperti edukasi gizi, penyediaan makanan tambahan, dan pelayanan kesehatan ibu hamil serta balita. Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk kelancaran implementasi kebijakan. Tenaga kesehatan, kader posyandu, dan pendamping desa memiliki peran strategis dalam implementasi program. Namun, jumlah SDM yang terbatas serta kurangnya pelatihan menjadi kendala utama. Keberadaan puskesmas, posyandu, serta pusat kesehatan masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan. Sarana yang memadai mempercepat distribusi layanan kesehatan kepada masyarakat. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi memungkinkan pemantauan data gizi anak dan ibu hamil secara real-time. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efektif.

Adapun kendala yang ditemukan pada *Variable* Sumber Daya adalah Jumlah tenaga kerja yang kurang dan minimnya pelatihan menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan serta pemantauan data. Selain itu, Banyak pihak masih menganggap Stunting sebagai permasalahan kesehatan semata, padahal intervensi multisektoral sangat diperlukan.

c. Komunikasi antar organisasi

Strategi komunikasi dalam kampanye penurunan stunting telah berjalan cukup baik melalui pendekatan perubahan perilaku dan komunikasi massif di masyarakat. Namun, efektivitas strategi masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif.

Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 menjadi landasan hukum dalam implementasi kebijakan stunting melalui 8 Aksi Konvergensi. Berdasarkan data primer, capaian pelaksanaan aksi konvergensi telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan sesuai rencana, meskipun tantangan koordinasi lintas sektor masih perlu diperbaiki.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, termasuk struktur organisasi, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung, intervensi dilakukan secara konvergen melalui lintas sektor, dengan koordinasi utama oleh Bappeda. Setiap OPD memiliki peran dalam intervensi spesifik (seperti pelayanan kesehatan dan gizi) serta intervensi sensitif (seperti peningkatan sanitasi, penyediaan pangan, dan pemberdayaan masyarakat). Namun, masih terdapat persepsi di beberapa OPD bahwa stunting hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, sehingga sinergi lintas sektor perlu diperkuat.

Dari segi sumber daya, keterbatasan anggaran APBD menjadi tantangan utama, sehingga perlu dukungan dari CSR dan lembaga non-pemerintah untuk membiayai program intervensi bagi kelompok prioritas. Selain itu, peran desa dalam mendukung kebijakan juga menjadi bagian penting dari struktur pelaksana. Secara keseluruhan, organisasi pelaksana telah memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih diperlukan peningkatan koordinasi serta integrasi program agar kebijakan berjalan lebih efektif dan mencapai target yang optimal.

e. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Faktor ekonomi yang mempengaruhi stunting di Kabupaten Bandung terutama berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan penghasilan rumah tangga, khususnya bagi pekerja di sektor informal. Rendahnya pendapatan berdampak pada akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi. Pemerintah telah memberikan bantuan seperti makanan tambahan dan bantuan sosial, namun

efektivitasnya masih bergantung pada keselarasan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala dalam memastikan program stunting dapat berjalan optimal.

Pendidikan ibu berperan penting dalam pemahaman tentang gizi dan kesehatan anak. Di beberapa wilayah, rendahnya tingkat pendidikan ibu berdampak pada kurangnya kesadaran terhadap pola makan sehat dan kebersihan. Selain itu, norma sosial tertentu, seperti pola pemberian ASI atau kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, juga dapat memengaruhi praktik pengasuhan yang berkontribusi terhadap stunting. Kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pencegahan stunting di daerah pedesaan menjadi tantangan lain yang perlu diatasi.

Komitmen politik pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting tercermin melalui kegiatan Rembug Stunting yang melibatkan lintas sektor. Upaya ini bertujuan untuk menganalisis situasi dan menyusun rencana intervensi berbasis perencanaan partisipatif. Namun, keterbatasan anggaran khusus untuk stunting masih menjadi kendala utama. Anggaran perangkat daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan skala kabupaten, sementara fokus pada desa lokus intervensi masih kurang optimal. Oleh karena itu, sinergi kebijakan dan perencanaan penganggaran yang lebih terarah diperlukan agar program stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

f. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam percepatan dan penanganan stunting di Kabupaten Bandung menunjukkan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan lainnya. Beberapa langkah yang mencerminkan sikap positif yaitu:

- 1) OPD terkait telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya stunting dan pentingnya pencegahan. Mereka juga menggandeng tokoh masyarakat agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada warga.
- 2) Pemerintah Kabupaten Bandung bersama lembaga non pemerintah dan masyarakat telah menyepakati komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Kesepakatan ini mencakup peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan peran masyarakat, serta optimalisasi manajemen data pemantauan pertumbuhan anak melalui posyandu dan program kesehatan lainnya.
- 3) Intervensi pencegahan diarahkan kepada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di desa-desa yang menjadi lokus intervensi. Pemerintah Kabupaten Bandung juga memanfaatkan data hasil pemantauan pertumbuhan anak untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
- 4) Upaya sosialisasi terus dilakukan melalui berbagai media, baik langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu fokus utama adalah mengubah pola pikir bahwa stunting semata-mata disebabkan oleh faktor keturunan dan tidak bisa diperbaiki.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Upaya penurunan stunting di Kabupaten Bandung didorong oleh beberapa faktor utama:

- a. Kabupaten Bandung memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, mencapai 31,1% (SSGI 2019), menjadikannya wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi ke-4 di Jawa Barat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan intervensi guna mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.
- b. Tersedianya layanan posyandu mempermudah pemantauan pertumbuhan anak, ditambah dengan edukasi dari berbagai pihak mengenai pencegahan stunting di tingkat keluarga. Selain itu, bantuan sarana dan prasarana seperti air bersih dan sanitasi turut mendukung upaya penanganan stunting.

- c. Program percepatan penanganan stunting telah dialokasikan dalam APBD dan sumber dana lainnya, dengan anggaran melekat pada OPD masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan 8 aksi konvergensi yang berfokus pada integrasi sumber daya dan koordinasi lintas sektor dalam intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Upaya ini ditujukan kepada kelompok prioritas di tingkat kelurahan dan desa.
- e. Jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai aset dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan percepatan penanganan stunting di Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, antara lain:

- a. Jumlah tenaga di lapangan yang terbatas serta kurangnya pelatihan bagi petugas menghambat pemenuhan data percepatan penanganan stunting. Keterlambatan dalam pengolahan data berdampak pada efektivitas intervensi yang dilakukan.
- b. Partisipasi orang tua dalam membawa anak ke fasilitas kesehatan masih rendah, sehingga menyulitkan deteksi dini kasus stunting. Rendahnya tingkat pendidikan ibu, pola asuh yang kurang optimal, serta budaya buang air besar sembarangan di beberapa wilayah meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan erat dengan stunting.
- c. Keterpaduan lintas sektor masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih efektif. Selain itu, seringnya pergantian atau mutasi ASN yang menangani program stunting menyebabkan kurangnya kesinambungan informasi, sehingga menghambat kelangsungan program yang telah dirancang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.:

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan
Standar dan tujuan kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 dan target nasional, tetapi pencapaian indikator layanan masih belum optimal, terutama dalam akses air bersih, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi.
- b. Sumber Daya
Sumber daya masih menjadi kendala utama, terutama dalam keterbatasan tenaga pelaksana yang terlatih dan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya efektif.
- c. Komunikasi antar organisasi
Komunikasi antar organisasi telah berjalan melalui koordinasi lintas OPD, namun masih terdapat ego sektoral yang menghambat integrasi kebijakan.
- d. Karakteristik organisasi pelaksana, menunjukkan bahwa meskipun OPD memiliki tugas yang jelas, masih ada anggapan bahwa stunting hanya merupakan isu kesehatan, padahal membutuhkan pendekatan multisektoral.
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pangan bergizi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pola asuh dan kesehatan masih menjadi faktor penghambat utama.
- f. Sikap para pelaksana, menunjukkan komitmen tinggi terhadap kebijakan ini, namun masih diperlukan penguatan monitoring dan dukungan anggaran agar hasil lebih optimal.

2. Faktor Pendukung

Adapun beberapa faktor pendukung diantaranya:

- a. Regulasi yang jelas melalui Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 sebagai dasar hukum kebijakan.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah melalui Pembentukan tim percepatan, rembuk stunting, dan koordinasi lintas sektor.
- c. Adanya dukungan anggaran melalui Alokasi APBD dan program multisektoral untuk intervensi gizi dan kesehatan.
- d. Ketersediaan Layanan Kesehatan, Posyandu dan puskesmas aktif dalam pemantauan dan intervensi.
- e. Adanya peran masyarakat dan swasta seperti Kader kesehatan, edukasi gizi, dan dukungan CSR dari dunia usaha.

3. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat diantaranya:

- a. Keterbatasan tenaga ahli gizi dan kader kesehatan di tingkat desa.
- b. Kurangnya integrasi program akibat sinergi yang belum optimal.
- c. Alokasi dana yang belum sepenuhnya difokuskan untuk intervensi stunting.
- d. Pola asuh yang masih dipengaruhi budaya serta kurangnya pemahaman gizi.
- e. Kemiskinan, akses pangan bergizi terbatas, serta sanitasi yang belum memadai.

Saran

Adapun saran untuk Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan serta kader gizi di tingkat desa melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
2. Memperkuat sinergi antar sektor dengan sistem monitoring terpadu untuk memastikan kesinambungan program.
3. Mengalokasikan anggaran lebih fokus pada intervensi spesifik dan sensitif, serta menjajaki pendanaan alternatif dari sektor swasta atau hibah internasional.
4. Meningkatkan kampanye mengenai pentingnya gizi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta mendorong perubahan perilaku pola asuh yang lebih sehat.
5. Memperluas akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan layanan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting.
6. Menjaga kesinambungan kebijakan melalui kebijakan yang tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan serta memastikan setiap pejabat yang baru memahami program yang sudah berjalan.

Daftar Pustaka

- Abdul, W. S. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Apriliana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256.
- Auerbach, C., & Silverstein, L. B. (2003). *Qualitative data: An introduction to coding and analysis* (Vol. 21). NYU Press.
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social science research: Principles, methods, and practices*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 1 (*Catatan: ini tampaknya bagian dari entri sebelumnya, sebaiknya digabung dengan Bhattacharjee jika itu memang lanjutannya.*)
- Darlington, Y., & Scott, D. (2012). *Qualitative Research in Practice: Stories From the Field*. Singapore: South Wind Productions.
- Denzin, N. K. (2000). *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed.). [Penerbit tidak tercantum].
- Dewi, R. K. (2016). *Studi analisis kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. [Penerbit tidak tercantum].
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods* (Ahmad Lintang Lazuardi, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Edisi asli: Sage) — Hlm. 231.
- Hermawati, H., & Sastrawan, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 8(2), 48–54.
- Jusuf Kalla. (2018). *Stunting: Strategi Nasional Percepatan Anak Kerdil*. [Penerbit tidak tercantum].
- Kalla, J. (2018). *Stunting: Strategi nasional percepatan anak kerdil*. [Penerbit tidak tercantum].
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.
- Kumar, R. (2011). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*. [Penerbit tidak tercantum].
- Lune, H., & Berg, B. L. (2001). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Marvasti, A. B., & Marvasti, A. (2004). Data analysis. Dalam *Qualitative research in sociology* (hal. 81–118). New Delhi: Sage Publication. — Hlm. 233.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sage, ndia: Sage. Hlm. 198 (*Catatan: entri ini tampaknya tidak lengkap; kemungkinan penulisan ganda. "Sage, ndia" mungkin maksudnya "Sage, India" atau "Sage" saja.*)
- Suharto, E. (2010). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- W, Lawrence, N. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. America: Pearson Education. — Hlm. 466.
- Handayani, A. (2019). Evaluasi kebijakan program 1000 hari pertama kehidupan dalam penanganan stunting pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri, Universitas Bandar Lampung*.
- Nurlatif, R. V. N., & Priharwanti, A. (2019). Stunting: Besaran masalah & strategi pencegahannya di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 3(02), 69–82.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
- Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024.
- Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tentang

Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Information about the authors:

Andika Doni Setiawan: andikadoni1309@gmail.com, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Indonesia

Cite this article as: Setiawan, Andika Doni. Et al. (2025). Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Bandung Tahun 2024. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(3). 470-479. <https://doi.org/10.52188/jeas.v6i3.1480>